

KOMPUTER & MASYARAKAT



UNIVERSITAS
INABA

MODUL – BAB IV

Komputer & Masyarakat

Dany Yudha Krisna, S.Kom, M.Si.



Bab IV

Tujuan :

1. Mengetahui definisi e-Government
2. Mengetahui Manfaat dan tujuan e-Government
3. Mengetahui Contoh/Aplikasi e-Government

Pemerintahan Terkomputerisasi

Pemerintah pada dasarnya adalah pelayan masyarakat yang selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dari waktu ke waktu.

Pemerintah di negara manapun di dunia ini, merupakan administrator data yang besar. Data merupakan salah satu bagian yang amat penting dalam administrasi pemerintahan. Lancarnya pelayanan amat tergantung dari kelengkapan data.

Berbagai jenis data seperti data kependudukan, perdagangan, kesehatan, industri, pegawai negeri, angkatan bersenjata, dll membuat pemerintah merupakan pemakai komputer terbesar. Berbagai jenis komputer digunakan untuk menunjang administrasi pemerintahan.

Berbeda dengan definisi e-Commerce maupun e-Business yang cenderung universal, e-Government sering digambarkan atau dideskripsikan secara cukup beragam oleh masing-masing individu atau komunitas. Hal ini disebabkan karena berbagai hal :

“Walaupun sebagai sebuah konsep e-Government memiliki prinsip-prinsip dasar yang universal, namun karena setiap negara memiliki skenario implementasi atau penerapannya yang berbeda maka definisi dari ruang lingkup e-Government pun menjadi beraneka ragam.”

“Spektrum implementasi aplikasi e-Government sangatlah lebar mengingat sedemikian banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah negara yang berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis interaksi dan transaksi.”

“Pengertian dan penerapan e-Government disebuah negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro pemahamannya teramat sangat ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi dari negara yang bersangkutan.”

“Visi, misi dan strategi pembangunan sebuah negara yang sangat unik mengakibatkan terjadinya beragam pendekatan dan skenario dalam proses pengembangan bangsa sehingga berpengaruh terhadap penyusunan prioritas pengembangan bangsa.”



Masalah definisi ini merupakan hal yang penting, karena akan menjadi bahasa seragam bagi para konseptor maupun praktisi yang berkepentingan dalam menyusun dan mengimplementasikan e-Government di suatu negara. Terkadang definisi yang terlalu sempit akan mengurangi atau bahkan meniadakan berbagai peluang yang ditawarkan oleh e-Government, sementara definisi yang terlalu luas dan mengembang akan menghilangkan nilai (value) manfaat yang ditawarkan oleh e-Government.

Terlepas dari berbagai perbedaan yang ada, sebenarnya ada sebuah benang merah yang dapat ditarik dari kebhinekaan tersebut. Sebelum melakukan hal tersebut, ada baiknya terlebih dahulu bagaimana berbagai komunitas atau institusi di dunia mendefinisikan e-Government.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information and Communication Technology/ICT) di dunia telah semakin luas. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan ICT yang tidak terbatas pada bidang perdagangan saja, melainkan juga dalam bidang-bidang lain, seperti bidang pendidikan, bidang pertahanan dan keamanan negara, sosial dan sebagainya. Baru-baru ini pemerintah juga mulai menerapkan sistem ICT ini.



informasi itu sendiri terdiri dari fungsi-fungsi input, proses, output, storage dan communication. Sistem informasi ini dipergunakan dalam praktek lembaga pemerintahan dalam semua bidang tugas dan fungsi Pemerintah yang didalamnya terdiri dari beberapa segi, antara lain pemerintahan, tata usaha negara, pengurusan rumah tangga negara dan pembangunan Sistem informasi dalam praktek pemerintahan merupakan sistem informasi manajemen dimana didalamnya terdapat proses pengolahan suatu informasi yang diperuntukkan untuk keperluan pengambilan keputusan dari suatu lembaga pemerintahan, dan karena peran pemerintah berkaitan dengan kepentingan publik maka segala sistem informasi yang dipergunakan harus memenuhi syarat efisien, efektif dan ekonomis. Dari konsep yang demikian maka mulai diterapkan penggunaan teknologi dalam sistem informasi pemerintahan.

Terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab masih lemahnya pemanfaatan komputer dalam proses pelayanan masyarakat di instansi pemerintah. Dimana hal ini berdampak pada masih berbelitnya segala urusan yang terkait dengan urusan birokrasi pemerintah. Dan biasanya, kerumitan tersebut menjadi pangkal terjadinya proses korupsi di Indonesia.

Beberapa hal yang menghambat penggunaan komputer di instansi pemerintah adalah:



1. Minimnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi. Hal ini karena sebagian besar pegawai pemerintah memiliki latar belakang pendidikan rendah dan berasal dari usia yang tidak produktif untuk belajar menerima hal yang bersifat baru.
2. Mental korup yang kuat, menjadikan masalah kerumitan birokrasi menjadi sebuah hal yang disengaja.
3. Belum meratanya pembangunan teknologi informasi khususnya di wilayah pedesaan dan kawasan luar Jawa. Sehingga masih menyulitkan untuk menciptakan system yang terintegrasi secara menyeluruh antar instansi pemerintah.
4. Masih rendahnya masyarakat yang melek komputer, sehingga sebagian masyarakat masih memilih untuk mendapatkan pelayanan dengan system konvensional yang berbasis pencatatan paper atau kertas.

Aplikasi Komputer di Pemerintahan

Berikut ini adalah jenis –jenis aplikasi yang penting yang menunjang kegiatan-kegiatan pemerintahan secara langsung baik yang bersifat operasional maupun yang mengarah kepada terciptanya kebijakan-kebijakan dalam masalah kenegaraan,



- Aplikasi kepegawaian, Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) adalah badan yang mengadministrasikan seluruh data kepegawaian. Aplikasi pengolahan datanya meliputi : kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi pegawai, penentuan masa pensiun.
- Aplikasi di pemerintahan daerah, Aplikasi komputer yang digunakan meliputi : bidang kependudukan (KTP), kepegawaian tingkat daerah, pajak-pajak daerah, perumahan dan lalu lintas.
- Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), Dibandingkan dengan negara-negara maju, perkembangan aplikasi komputer dalam pemerintahan Indonesia tergolong lambat. Hal ini disebabkan karena :
 - Biaya
 - Sistem administrasi pemerintahan masih dalam proses pengembangan

Jadi, secara umum permasalahan yang timbul dengan adanya komputerisasi di pemerintahan belum cukup besar untuk dipermasalahkan secara nasional

Sedangkan di negara-negara maju, perkembangan aplikasi komputer dalam bidang pemerintahan berlangsung dengan cepat, sehingga komputerisasi mulai menimbulkan masalah di negara-negara tersebut.

E-Government

Mengacu pada definisi yang diajukan oleh World Bank, e-Government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh instansi-instansi atau badan-badan pemerintahan(misal dengan Wide Area Networks, Internet, komputer bergerak, dst),

yang dengan semua itu mempermudah dan meningkatkan kemampuan transformasi hubungan antara warga negara, dunia bisnis, dan bagian-bagian lain dari pemerintahan. Teknologi informasi ini dapat melayani segala bentuk kebutuhan yang berbeda karena layanan yang lebih baik dari pemerintah kepada warganya, peningkatan interaksi antara bisnis dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, hingga efisiensi manajemen pemerintahan. Hasil yang akan dapat dilihat dari penggunaan Teknologi Informasi (TI) adalah penurunan korupsi, meningkatkan transparansi, kesenangan yang lebih baik, pertumbuhan pajak dan penghasilan, dan/atau reduksi biaya-biaya.

Masih menurut World Bank, secara tradisional, biasanya interaksi antara seorang warga negara atau pengusaha dengan badan pemerintah selalu berlangsung di kantor-kantor pemerintahan. Namun seiring dengan pemunculan teknologi informasi dan komunikasi (ICT, Informations and Communications Technology) semakin memungkinkan untuk mendekatkan pusat-pusat layanan pemerintah kepada setiap klien. Sebagai misal jika ada pusat layanan yang tak terlayani oleh badan pemerintah, maka ada kios-kios yang didekatkan kepada para klien atau dengan penggunaan komputer di rumah atau di kantor-kantor.

Jika kita analogikan dengan e-Commerce, dimana dimungkinkan para kalangan bisnis melakukan transaksi diantara mereka dengan lebih efisien (B2B) dan membawa para pengguna lebih dekat pada kalangan bisnis (B2C), eGov bertujuan untuk membuat interaksi antara pemerintah dan warganya (G2C), pemerintah dan kalangan bisnis (G2B), dan hubungan antar lembaga (G2G) lebih baik, serasi, transparan dan murah.

E-Commerce mempersiapkan segalanya melalui 4 tahap :



- 1) penerbitan/publikasi,
- 2) antar aktivitas,
- 3) melengkapi transaksi, dan
- 4) pengiriman.

Saat ini, sebagian besar aktifitas eGov berpusat pada publikasi/penerbitan. Sebuah studi yang dilakukan Anderson Consulting menemukan perbedaan yang luas diantara negara-negara dalam usaha mereka membangun eGov.

Tanpa mengecilkan arti dari beragam contoh definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, setidaknya-tidaknya ada tiga kesamaan karakteristik dari setiap definisi e-Government, yaitu masing-masing adalah :

Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern), antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder) dimana melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama berjalan.

Secara jelas dua negara besar yang terdepan dalam mengimplementasikan konsep e-Government, yaitu Amerika dan Inggris melalui Al Gore dan Tony Blair, telah secara jelas dan terperinci menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep e-Government bagi suatu negara, antara lain :

- a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholdernya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.



- b. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance.
- c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
- d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
- e. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada serta memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Dengan kata lain, negara-negara maju memandang bahwa implementasi e-Government yang tepat akan secara signifikan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di suatu negara secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum. Oleh karena itu, impementasinya di suatu negara selain tidak dapat ditunda-tunda, harus pula dilaksanakan secara serius, dibawah suatu kepemimpinan dan kerangka pengembangan yang holistik, yang pada akhirnya akan memberikan/mendatangkan keunggulan kompetitif secara nasional.

Tujuan E-Government



Memberi kemudahan dan kesederhanaan prosedur, sehingga penerapannya memerlukan perubahan struktur organisasi pemerintahan itu sendiri.

• Membentuk hubungan:

- G2C (Government to Citizen)
- G2B (Government to Business)
- G2G (Government to Government)

Manfaat Umum E-Government

Peningkatan hubungan antara:

- Pemerintah
- Pelaku bisnis
- Masyarakat umum

Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari kesemua pihak.

Aplikasi Komputer di Pemerintahan

- Aplikasi kepegawaian
- Aplikasi di pemerintahan daerah
- Aplikasi Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK)
- Aplikasi perpajakan
- Aplikasi pertanahan, dll.

Jenis Layanan E-Government



Layanan e-Gov yang terintegrasi dapat dipilah dalam tiga level, yaitu:

- Publikasi, pemerintah secara transparan mempublish ke website segala macam informasi, kebijakan, prosedur, aturan perundangan, aktivitas pemerintahan dsb.
- Interaksi, pemerintah dan masyarakat dapat melakukan komunikasi dua arah melalui media web maupun email, sebagai upaya mengikut sertakan masyarakat dalam proses pembangunan daerah, tentunya hal ini sangat sejalan dengan semangat otonomi daerah.
- Transaksi, pemerintah mengikutsertakan masyarakat secara terbuka untuk bertransaksi dengan pemerintah, misalnya dalam hal lelang maupun tender online, lebih jauh lagi pemerintah dapat memfasilitasi masyarakat dengan investor untuk melakukan kegiatan e-business.

Kiat Sukse E-Government

Pemanfaatan ICT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan:

- Penggunaan Internet
- Penggunaan Infrastruktur Telematika
- Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi
- Standarisasi Metadata
- Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik
- Sistem Dokumentasi Elektronik
- Pembangunan Basis Data Terintegrasi

Adanya 5 kategori ketersediaan :



- akses jaringan yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat baik medianya (PC,PDA, Mobile Phone dll) maupun tempat aksesnya (Kantor, Kampus, Fasilitas Pemerintah, Warnet, Warintek, dll).
- kepemimpinan pemerintah dan industri dalam mengusahakan e-government dan e-business.
- kekuatan hukum dalam melindungi hak intelektual.
- ketersediaan tenaga kerja yang mendukung e-business.
- iklim e-business.

Perubahan Paradigma Komputer dalam Pemerintahan

ICT hanyalah sebatas tools, namun yang terpenting dari e-government adalah perubahan paradigma, dari Government Centric menuju Customer Centric sehingga layanan-layanan yang diberikan sesuai dengan apa yang menjadi ke butuhan masyarakat.

Hambatan dan Tantangan dalam E-Government

Masalah Pendanaan :

- Sudah tersedia dana, tapi belum tahu bagaimana memanfaatkannya
- Sudah tersedia dana, perencanaan penggunaannya masih semrawut
- Dana yang sudah dikeluarkan tidak tepat sasaran
- Alokasi dana kurang proporsional
- Perlu metoda untuk optimalisasi dana

Infrastruktur (fisik dan non-fisik)



- Sarana fisik: perangkat hardware, Jaringan telekomunikasi, fasilitas IT lainnya
- Sarana non-fisik:
- Perangkat peraturan dan perundang-undangan
- Kebijakan

Masalah Standarisasi

- Agar proses pelayanan dapat memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan
- Agar proses berjalan secara seragam
- Agar ada prosedur operasional yg stabil
- Agar terjadi keunikan dalam identifikasi data dan kemampuan penelusuran data
- Agar integrasi e-government secara nasional dapat berjalan dengan lancar

Sumber Daya Manusia (SDM)

- Kultur berbagi belum ada.
- Kultur mendokumentasi belum lazim.
- Tempat akses yang terbatas.

Dengan di gunakannya teknologi komputer di dalam pemerintahan, artinya komputer memiliki peran penting dalam bidang tersebut. Dengan adanya electronic government, pemerintah dapat lebih mudah melakukan berbagai macam kegiatan pemerintahan. Dengan segala informasi yang dapat di lihat oleh masyarakat, kegiatan pemerintahan akan lebih transparan dan membuat masyarakat menjadi lebih percaya terhadap fungsi pemerintahan.



Daftar Pustaka

1. Preston, John & Sally, Teknologi Informasi dan Masyarakat, Andi Offset, Yogyakarta, 2007.
2. Budiardjo, Bagio, Teknologi InformasidanMasyarakat, PT Elex media Komputindo, Jakarta, 1982
3. Aji Supriyanto, " Pengantar Teknologi Informasi", Salemba-Jakarta, 2005 Jogyianto H.M, Pengenalan Komputer, Yogyakarta: Andi Offset Albert Paul Malvino,
4. Elektronika Komputer Digital Pengantar Mikrokomputer, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1993
5. J.Quinn, Michael. Etichs for the Information Age. Pearson Education. 2013. 5th Edition.
6. Christopher Levy (3 Februari 2003). "Making Money with Streaming Media". streamingmedia.com. Diakses 2006-6-28.
7. Litman, Jessica (2000). Digital Copyright. Berlin: Prometheus Books. hlm. 208. ISBN 1-57392-889-5.(Wikipedia)
8. Afifah Kusumadara. Perlindungan Program Komputer Menurut Hukum Hak Kekayaan Intelektual. 2003
9. Komputer dan Masyarakat, Bagio Budiardjo, PT. Elex Media Komputindo
10. Sistem Informasi Manajemen, Kenneth C.Laudon, Jane P.Laudon
11. Pengantar Teknologi Informasi, O'Brien
12. UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik